

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA  
MATTIROWALIE KECAMATAN TANETE RIAJA  
KABUPATEN BARRU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan Pada Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar**

**KAMALUDDIN  
1261542040**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
2016**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing yang ditunjuk berdasarkan surat persetujuan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Nomor : 2121/UN36.6/DL/2016 Tanggal 29 April 2016 untuk membimbing Saudara :

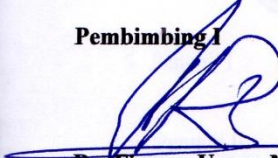
Nama : Kamaluddin  
NIM : 1261542040  
Jurusan : PPKn/S1  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Judul Skripsi : **Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru**

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan dipertahankan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar pada hari Senin, 29 Agustus 2016 dan dinyatakan Lulus.

Makassar, 20 September 2016

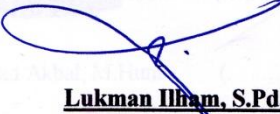
Menyetujui :

Pembimbing I



**Dr. Firman Umar, M.Hum.**  
NIP : 19610812 198803 1 002

Pembimbing II



**Lukman Ilham, S.Pd, M.Pd.**  
NIP : 197107103 200701 001

## PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dengan **SK Dekan No. 4792/UN36.6/KM/2016** Tanggal 22 Agustus 2016. Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pada hari Senin, 29 Agustus 2016.

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Makassar

**Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum**  
NIP. 19671231 199303 1 016

Panitia Ujian :

1. Ketua : Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum. (.....)
2. Sekretaris : Drs. Mustaring, M.Hum. (.....)
3. Pembimbing I : Dr. Firman Umar, M.Hum. (.....)
4. Pembimbing II : Lukman Ilham, S.Pd, M.Pd. (.....)
5. Penguji I : Prof. Dr. Manan Sailan, M.Hum. (.....)
6. Penguji II : Dr. Muhammad Akbal, M.Hum (.....)



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Kamaluddin  
 NIM : 1261542040  
 Tempat/ Tgl lahir : Limpo, 11 Oktober 1992  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Jurusan : PPKn  
 Judul Skripsi : **Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru**

Dengan dosen pembimbing masing-masing :

1. **Dr. Firman Umar, M.Hum.**
2. **Lukman Ilham, S.Pd, M.Pd.**

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari unsur ciplakan/plagiat.


Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan apabila kemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya bersedia dituntut di dalam/luar pengadilan dan menanggung segala resiko yang diakibatkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab formal untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Makassar, 20 September 2016

**Diketahui Oleh :**

**Ketua Jurusan PPKn**

  
**Dr. Mustari, M.Hum**  
 NIP. 19681231 199003 1 015

**Yang Membuat Pernyataan,**

  
**Kamaluddin**  
 NIM:1261542040

**"CARA TERBAIK UNTUK KELUAR DARI SUATU  
PERSOALAN ADALAH MEMECAHKANNYA"**

**(Kamaluddin)**

**"Kupersembahkan karya terbaikku ini sebagai darma  
baktiku untuk Alm. ayahanda dan Alm. ibunda tercinta,  
serta saudara dan keluargaku tersayang atas segala doa,  
dukungan, motivasi, dan bantuannya"**

**ABSTRAK**

**Kamaluddin, 2016. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Firman Umar dan Lukman Ilham.**

Penelitian ini bertujuan untuk: 1), Mengetahui dan memperoleh data mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru2), Mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dan Mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **1.** Pelaksanaan tugas pokok BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru belum sepenuhnya dilakukan secara optimal karena hanya 3(tiga) tugas pokok yang dilaksanakan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala Desa dan proses pembahasan dan penetapan peraturan desa bersama dengan kepala desa, dari 6(enam) tugas pokok yang telah ditetapkan berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005. Selanjutnya Mengenai Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan APBDes. **2.** faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dipengaruhi oleh 2(dua) faktor yaitu faktor pendorong yang meliputi Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor penghambat yang meliputi kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, Sarana dan prasarana, kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta Adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran *Tuhan Yang Maha Esa*, atas segala rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis masih diberikan kesehatan, kekuatan, petunjuk dan kemudahan dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”** dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Meski demikian penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya penulis terbuka untuk diberikan kritikan maupun masukan.

Dalam penyusunan skripsi, penulis menyadari begitu banyak kesulitan, baik dalam proses pengumpulan bahan pustaka maupun dalam penyusunannya. Namun, karena begitu banyak doa, motivasi, dukungan dan perhatian yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini berlangsung, sehingga segala hambatan yang ada dapat dihadapi dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. **Prof. Dr. Husain Syam, M.TP**, Rektor Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan peluang untuk mengikuti proses perkuliahan pada Jurusan PPKn.
2. **Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar beserta staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar atas semua bantuannya selama penulis menempuh studi di Universitas Negeri Makassar.
3. **Dr. Mustari, M.Hum**, Ketua Jurusan PPKn dan **Lukman Ilham, S.Pd, M.Pd.** sekretaris Jurusan PPKn atas pelayanan yang diberikan selama ini.
4. **Dr. Firman Umar, M.Hum**, pembimbing I dan **Lukman Ilham, S.Pd, M.Pd.** pembimbing II yang telah banyak mencurahkan tenaga dan pikiran serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan

dengan baik, dan memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. **Prof. Dr. Manan Sailan, M. Hum**, penguji I dan **Dr. Muhammad Akbal, M. Hum**. penguji II yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberi masukan, koreksi serta arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial beserta Staf Pegawai yang telah banyak memberikan pengetahuan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial untuk menorehkan tinta emas di almamater orange yang tercinta.
7. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta, saudaraku tercinta **Sirajuddin** dan **Darmawati** yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. **Dra. Hj. I. Calli**, Pj Kepala Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru yang telah memberikan keterangan serta memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi.
9. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis, untuk memberikan informasi dan data-data dalam penyusunan skripsi.
10. Semua keluargaku tanpa terkecuali, terimakasih atas segala bantuannya, suportnya, dan dukungan doanya selama penulis dalam bangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan dan menghargai kritik dan saran dari pembaca guna



menyempurnakan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi salah satu bahan informasi pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya.

**Makassar, 1 Agustus2016**

**Penulis**

#### **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii

	10
SURAT PERNYATAAN KESALIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANKA KONSEP .....	
A. Tinjauan pustaka .....	6
1. Pengertian peranan .....	6
2. Tinjauan umum tentang BPD .....	10
a. Pengertian BPD .....	10
b. Persyaratan calon anggota BPD .....	11
c. Hak BPD .....	12
d. Kewajiban anggota BPD .....	12
e. Tugas BPD .....	13
f. Fungsi BPD .....	15
g. Peraturan tata tertib BPD .....	15
h. Peran BPD dalam musyawarah Desa .....	16
i. Mekanisme musyawarah BPD .....	16
3. Tinjauan umum tentang pemerintah Desa.....	17
a. Wewenang Kepala Desa .....	17
b. Hak Kepala Desa.....	18
c. Kewajiban Kepala Desa .....	19
d. Larangan bagi Kepala Desa .....	21
e. Kepala Desa dalam penyusunan produk hukum Desa.....	22
4. Penyelenggaraan pemerintah Desa .....	22
B. Kerangka konsep .....	24

BAB III	METODE PENELITIAN .....	25
	A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	25
	B. Lokasi Penelitian.....	26
	C. Deskripsi Fokus.....	26
	D. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian .....	27
	E. Sumber Data Penelitian.....	28
	F. Instrument Penelitian .....	29
	G. Prosedur Pengumpulan Data .....	29
	H. Pengecekan Keabsahan Data.....	30
	I. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN .....	33
	A. Hasil Penelitian .....	33
	1. Gambaran umum lokasi penelitian.....	33
	2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.....	41
	3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pengawasan BPD di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.....	51
	B. Pembahasan.....	56
	1. Tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru .....	56
	2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru .....	60
BAB V	PENUTUP.....	62
	A. Kesimpulan .....	62
	B. Implikasi.....	63
	C. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	.....	65

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 4.1	Daftar luas wilayah setiap dusun Desa Mattirowalie	35
Tabel 4.2	Perincian jumlah penduduk laki-laki dan perempuan setiap dusun	36
Tabel 4.3	Perbandingan jumlah KK sejahtera dan prasejahtera di Desa Mattirowalie	36

Tabel 4.4	Daftar mengenai keadaan mata pencaharian penduduk Desa Mattirowalie	37
Tabel 4.5	Daftar nama dusun dan jumlah RT-nya	37
Tabel 4.6	Daftar sarana umum yang ada di Desa Mattirowalie	38
Tabel 4.7	Daftar sarana pendidikan yang ada di Desa Mattirowalie	38
Tabel 4.8	Daftar sarana keagamaan yang ada di Desa Mattirowalie	38
Tabel 4.9	Daftar sarana transportasi yang ada di Desa Mattirowalie	39
Tabel 4.10	Daftar kualitas jalan yang ada di Desa Mattirowalie	39
Tabel 4.11	Beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPD Desa Mattirowalie	42
Tabel 4.12	Data mengenai peraturan desa (perdes) yang ada di Desa Mattirowalie, tahun 2016	45
Tabel 4.13	Asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2016	47
Tabel 4.14	Anggaran Pendapatan dan Belanja desa tahun anggaran 2016	49

### DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Skema Kerangka Konsep	24

### DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul
1	Lembar Pengesahan Pengajuan Judul
2	Lembar Pengesahan Pengajuan dalam Seminar Proposal
3	Sistematika Proposal Penelitian
4	Undangan Proposal Penelitian
5	Berita Acara Kelayakan Seminar Proposal
6	Lembar Pengesahan Pengajuan Jilid Proposal
7	Surat Permohonan Ke BKPM
8	Surat Pengantar Izin Penelitian dari BKPM
9	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Barru
10	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
11	Lembar Pengesahan Pengajuan dalam Seminar Hasil

12	Undangan Seminar Hasil
13	Peretujuan Pembimbing Untuk Ujian Skripsi
14	Undangan Ujian Skripsi
15	SK Dekan Fakultas Ilmu Sosial
16	Struktur Organisasi Desa Mattirowalie
17	Struktur Pengurus BPD Desa Mattirowalie
18	Daftar Istilah
19	Ur Daftar Informan
20	Daftar Pertanyaan Wawancara
21	Dokumentasi
22	Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Desa adalah sebuah entitas sosial yang memiliki tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, daerah indonesia dibagi atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa.

Dengan demokrasi pemerintahan Desa yang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah yang bersifat Otonom, dan berwenang mengatur



dan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat.

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang masih perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Eksistensi desa memiliki arti penting dalam proses pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, untuk mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada wilayah pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh. Agar program pemerintah berjalan efektif maka perlu adanya kepemimpinan aparatur Desa dalam mengelola atau mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pemerintahan Desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa.

Kemudian dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini

dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing.<sup>1</sup>

BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan Desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Pembahasan mengenai BPD dalam Undang-Undang (UU No.32 Tahun 2004), pasal 209 dinyatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Demikian juga dengan masa jabatan BPD, mereka hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. Dari penjelasan di atas BPD hanya mempunyai 2 (dua) fungsi saja sebagaimana yang dijelaskan pasal 209. Berbeda dengan Undang-undang yang berlaku sekarang yaitu UU RI Nomor 6 Tahun 2014 yang terdapat dalam (pasal 55) dijelaskan bahwa BPD mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

---

<sup>1</sup>Dr. Ni'matul Huda, S.H, M.Hum. Hukum Pemerintahan Desa.cetakan pertama(malang:setara press 2015)hal 215

Demikian juga BPD bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut.

Dari sini kemudian berlanjut pada hubungan antara Kepala Desa dan BPD. Jika sebelumnya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tidak memberikan legitimasi kepada BPD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Kepala Desa, hal ini berbeda dengan Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk itu. Pengaturannya lebih lanjut didasarkan pada peraturan pemerintah.

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa yang efektif mutlak diperlukan. Pemerintah Desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam membangun dan mengelola pemerintahan di desa. Pemerintah Desa selaku eksekutif di desa, berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu, Pemerintah Desa harus mampu membangun kemitraan, baik dengan BPD, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Dalam kondisi realitas, meskipun telah diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, lembaga BPD di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru belum sepenuhnya melaksanakan tugas pokoknya. Selain itu BPD juga perlu memberikan fungsi pengawasan yang kuat kepada kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Agar dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan pemnimpangan terhadap APBDes.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Berdasarkan hasil dari prapenelitian peneliti.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian di desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru mengenai “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanapelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasanBPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru ?

## **C. Tujuan Peneltian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya tentang pemerintahan Desa di dalam lembaga pendidikan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Kesarjanaan Strata 1 (S1).

- b. Bagi Pemerintah Desa

Secara praktis, hasil peneliitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru untuk

saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum/pembaca terutama para anggota BPD mengenai fungsi BPD berdasarkan peraturan yang ada, agar dalam melaksanakan tugasnya tidak melampau batas yang ditentukan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pengertian peranan**

Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat. Peranan (role) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang, peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Jadi Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.<sup>3</sup>

Adapun pengertian peranan menurut beberapa para ahli sebagai berikut :

Menurut Anton moelyono (1949: 67), peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain.<sup>4</sup>

Soekanto (1984: 237) “Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status)”. Apabila seseorang yang melakukan hak dan

---

<sup>3</sup>Tim akar media, kamus lengkap praktis bahasa indonesia. (surabaya: akar media 2003) hal 360.

<sup>4</sup><http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan.html>. 23:20

kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.

Nasution (1994: 74 ) menyatakan bahwa “peranan adalah mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan”. Lebih lanjut Setyadi (1986 : 29 ) berpendapat ”peranan adalah suatu aspek dinamika berupa pola tindakan baik yang abstrak maupun yang kongkrit dan setiap status yang ada dalam organisasi”.

Usman (2001 : 4 ) mengemukakan “ peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku.<sup>5</sup>

Menurut levinson (1981:46),paling sedikit peranan mencakup tiga hal,yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan cara memperolehnya,peranan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

---

<sup>5</sup> <http://www.ras-eko.com/2016/01/25/pengertian-peranan.html>.00:27

1. Peranan bawaan (ascribed roles) yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha. misalnya peranan sebagai kepala desa dan sebagainya.
2. Peranan pilihan (achieves roles) yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri, misalnya memutuskan untuk memilih kuliah di program studi Ppkn.

Adapun beberapa istilah yang berkaitan dengan peranan seperti berikut :

- a. Kesenjangan peranan (role distance) adalah dalam menjalankan peran secara emosional. hal ini akibat peranan yang harus ia jalankan tidak memperoleh prioritas tinggi dalam hidupnya.
- b. Ketegangan peranan adalah seorang yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan suatu peran yang telah ditentukan karena adanya ketidakserasian antara kewajiban dan tujuan peran itu sendiri.
- c. Kegagalan peranan adalah jika seseorang harus menjalankan beberapa peranan sekaligus dan dengan demikian tentunya akan mengalami tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan.
- d. Rangkaian peranan (role set) terjadi karena individu dianggap bertanggung jawab atas status yang diembanya, mereka akan terlibat dengan seperangkat peran yang berhubungan dan identik dengan status itu.

- e. Model peranan adalah orang-orang yang kita kenal agak istimewa dan dari mana kita meniru mencontoh perilakunya.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh aparat desa baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa.

## **2. Tinjauang umum tentang BPD**

### **A. Pengertian BPD**

BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokkratis.<sup>7</sup>

BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa.<sup>8</sup>

Dengan demikian pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji,

---

<sup>6</sup>Syahril syarbaini rusdiyanta,dasar-dasar sosiologi.edisi pertama (yogyakarta:graha ilmu 2009)hal 46

<sup>7</sup>Drs. Moch. Solekhan, MAP. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Cetakan pertama (malang:setara press 2014)hal 76

<sup>8</sup>Purwo Santoso, pembaharuan Desa seacara partisipatif.cetakan pertama (yogyakarta:pustaka pelajar 2003)hal 96

anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.<sup>9</sup>

BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

#### B. Persyaratan calon anggota BPD

Berdasarkan UU RI No.6 2014 pasal 56, menyatakan anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Adapun persyaratan calon anggota BPD sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta

---

<sup>9</sup>Dr. Ni'matul Huda, S.H, M.Hum. Hukum Pemerintahan Desa.cetakan pertama(malang:setara press 2015)hal 215

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika

3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
5. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis<sup>10</sup>

#### C. Hak BPD

1. Hak BPD sebagai berikut:
  - Meminta keterangan kepada pemerintah desa
  - Menyatakan pendapat
2. Hak anggota BPD sebagai berikut:
  - Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
  - Mengajukan pertanyaan
  - Menyampaikan usul dan pendapat
  - Memilih dan dipilih
  - Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Desa. Cetakan pertama (jakarta:Sinar grafika 2014) hal 35

<sup>11</sup>Ibid, hal 38



D. Kewajiban Anggota BPD sebagai berikut :

- Mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI.
- Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- Memproses pemilihan kepala desa.
- Mengdahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.<sup>12</sup>

E. Tugas BPD

Secara yuridis tugas BPD mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sebagai berikut:

1. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

---

<sup>12</sup>Drs.sarman,MH,Hukum. pemerintahan daerah di indonesia.(jakarta:rineka cipta 2011)hal.299

2. Mengusulkan dan menetapkan calon terpilih kepala desa. Dalam hal ini masyarakat mengetahui calon terpilih yang akan mereka pilih dalam waktu pemilihan, diharapkan masyarakat mengenal watak, karakter serta latar belakang pendidikan dan sosial lainnya secara utuh.
3. Bilamana kinerja kepala desa telah menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan atau telah habis masa jabatannya, maka kepala desa tersebut oleh BPD diusulkan untuk diberhentikan.
4. Kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD, dan bersama-sama BPD untuk membahas dalam rapat paripurna, sesuai dengan tata tertib yang dimiliki BPD. BPD dengan tugas dan wewenangnya ikut serta untuk menyetujui atau mengesahkan, dan kepala desa melaksanakan peraturan desa, dan keputusan desa setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.
5. Kepala desa mengajukan Rancangan APBDes kepada BPD untuk disahkan menjadi APBDes dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Karena dengan anggaran, pemerintahan desa dapat berjalan untuk membangun sarana dan prasarana umum.
6. BPD menjalankan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa. Pengawasan BPD berupa: a. PERDES dan peraturan Perundang-undangan lainnya, b. Pelaksanaan peraturan Pelaksanaan - peraturan dan keputusan desa, c. Kebijakan pemerintahan desa' d. Pelaksanaan kerjasama.

7. Pertimbangan dan saran-saran dari BPD terdapat pemerintahan desa dan masyarakat, selalu dijaga agar segala kepercayaan serta dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
8. Segala aspirasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan, BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan kerjasama yang baik.

#### F. Fungsi BPD

BPD sangat diharapkan oleh masyarakat Desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota BPD harus mampu mewakili masing-masing daerah yang memilihnya. Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. BPD mempunyai 3(tiga) fungsi yaitu :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa<sup>13</sup>

#### G. Peraturan Tata Tertib BPD sebagai berikut:

1. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Desa. Cetakan pertama (jakarta:Sinar grafika 2014) hal 35

2. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
3. tata cara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
4. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permasyarakatan Desa dan anggota Badan Permasyarakatan Desa; dan
5. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa.<sup>14</sup>

#### H. Peran BPD dalam musyawarah Desa

Peran BPD adalah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan musyawarah Desa. Tanggung jawab itu mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca musyawarah desa (musdes) :

- 1) Tahap persiapan, BPD bertanggung jawab memastikan kelompok-kelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Hasil pemetaan kebutuhan inilah yang akan menjadi bahan dalam menetapkan prioritas belanja Desa. BPD bersama masyarakat juga melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang di jadikan bahan pembahasan musyawarah Desa
- 2) Tahap pelaksanaan, BPD memimpin penyelenggaraan musyawarah Desa

---

<sup>14</sup>Dikutip dari PP RI NO.43 Tahun 2014 (pasal 77)

- 3) Tahap setelah Musdes, BPD memastikan prioritas belanja yang ditetapkan Musdes dan rekomendasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah Desa.<sup>15</sup>

I. Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut :

- 1) Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
- 2) Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa
- 3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat
- 4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara
- 5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir
- 6) Hasil musyawarah badan permusyawaratan desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ahmad Erani Yustika. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. cetakan pertama. (Jakarta selatan: kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi RI 2015) hal 31-32

<sup>16</sup>Undang-Undang Desa. Cetakan pertama (Jakarta: Sinar Grafika 2014) hal 39

### 3. Tinjauan umum tentang Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai wewenang, hak, dan kewajiban sebagai berikut :

#### A. Wewenang Kepala Desa :

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan peraturan Desa
- 3) Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 6) Membina perekonomian Desa
- 7) Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

#### B. Hak Kepala Desa

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa

#### C. Kewajiban Kepala Desa

- 1) Memegang tegu dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender

---

<sup>17</sup>Dr. Hanif Nurcholis, M.Si. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (erlangga 2011) hal 74

- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- 7) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik
- 9) Mengelola keuangan dan Aset Desa
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- 11) Menyelesaikan perselisian masyarakat di Desa
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud uraian diatas, Kepala Desa wajib :

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota



- b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
- c) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran
- d) Memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran<sup>18</sup>

D. Larangan bagi Kepala Desa yaitu :

- 1) Merugikan kepentingan umum
- 2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan untuk golongan tertentu.
- 3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya.
- 4) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu.
- 5) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.
- 6) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- 7) Menjadi pengurus partai politik.
- 8) Menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang.

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Desa. Cetakan pertama (jakarta:Sinar grafika 2014) hal 16

- 9) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR dan jabatan lain.
- 10) Ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan Kepala Daerah.
- 11) Melanggar sumpah atau janji jabatan.
- 12) Meinggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>19</sup>

E. Peran Kepala Desa dalam penyusunan produk hukum Desa

Peran Kepala Desa dalam penyusunan produk hukum Desa adalah menetapkan dan menandatangani rancangan produk hukum yang telah disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD. Jenis produk hukum desa tersebut yaitu :

1) Peraturan Desa (Perdes)

Peraturan desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

2) Peraturan Kepala Desa

Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang mempunyai fungsi sebagai peraturan pelaksana dari Perdes ataupun pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi.

3) Peraturan bersama Kepala Desa

Peraturan ini merupakan peraturan yang materi muatan merupakan kesepakatan bersama antara dua Desa atau lebih.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Dr. Huda Ni'matul, S.H, M.Hum. Hukum Pemerintahan Desa.cetakan pertama(malang:setara press 2015)hal 221-222

<sup>20</sup>Ahmad Erani Yustika. Memahami Unndang-Undang Desa. cetakan pertama.(jakarta selatan:kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi RI 2015)hal 9-10

#### 4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah

Desa berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) Kepastian hukum                     | 9) Profesionalitas |
| 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan | 10) Akuntabilitas  |
| 3) Tertib kepentingan umum             | 11) Keterbukaan    |
| 4) Efektivitas dan efisiensi           |                    |
| 5) Proporsionalitas                    |                    |
| 6) Kearifan lokal                      |                    |
| 7) Keberagaman                         |                    |
| 8) partisipatif <sup>21</sup>          |                    |

b. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat muatan materi

peraturan desa sebagai berikut :

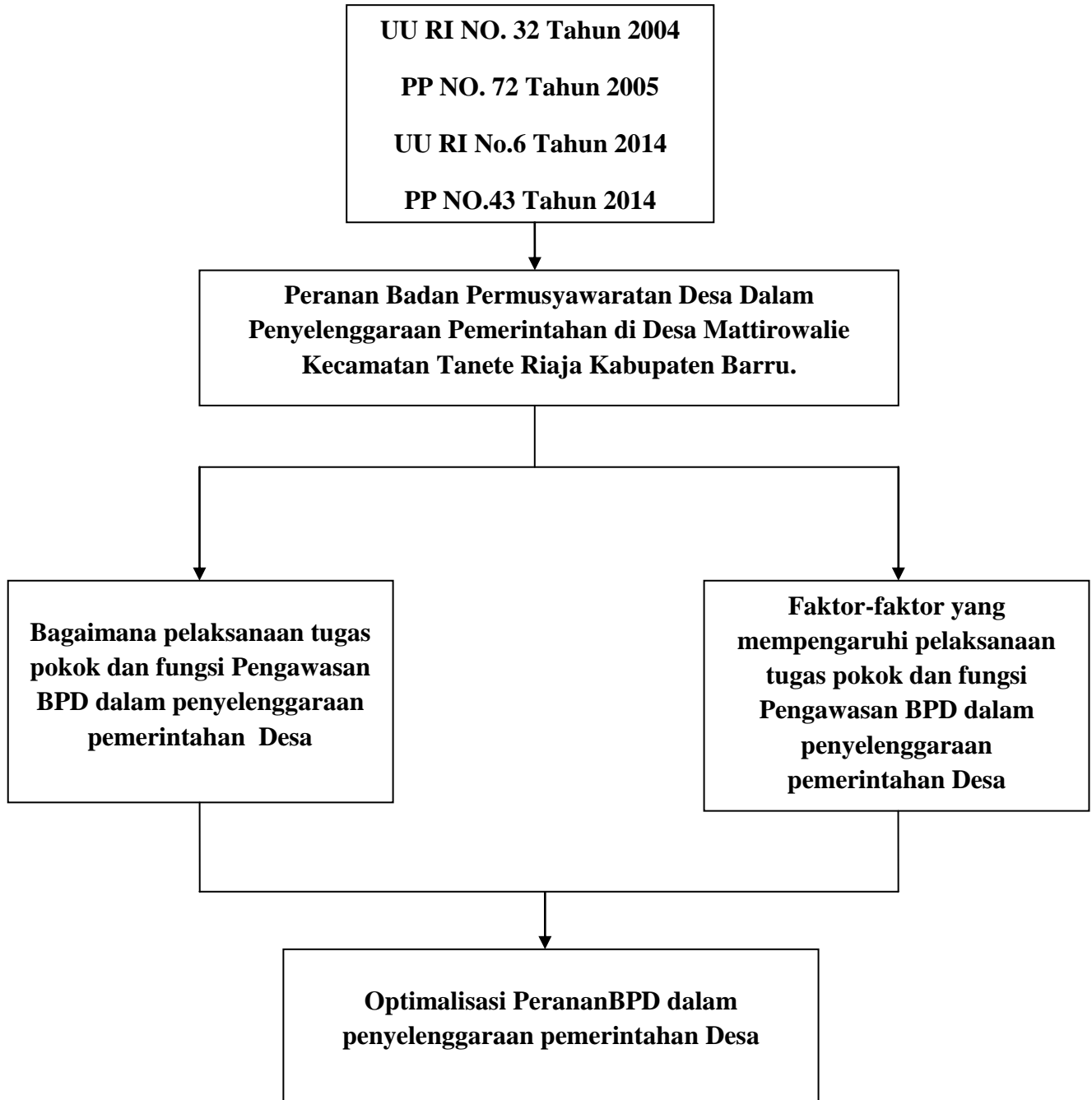
- 1) Muatan materi yang tertuang dalam peraturan Desa antara lain:
  - Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersipat mengatur
  - Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa
  - Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat Desa
- 2) Materi peraturan Desa dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di Desa yang perlu pengaturannya
- 3) Semua materi peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Dikutip dari UU RI NO.6 Tahun 2014 (pasal 23 dan 24)

<sup>22</sup>Prof. Drs. HAW. Widaja. Otonomi desa. Cetakan ketujuh.(jakarta:rajawali pers 2014)hal 96

## B. Kerangka Konsep

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka berfikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1

SKEMA KERANGKA KONSEP

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatandan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pendekatan yang adalah pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan dilapangan karena pendekatan kualitatif bersifat dinamis. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif ini memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

##### **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui secara langsung Peranan Badan

Permasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh, dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan lebih dahulu. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena mudah dijangkau oleh peneliti sehingga proses penelitian dan pengambilan data akan berjalan efektif.

## **C. Deskripsi Konsep**

Deskripsi konsep tentang BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru yang akan dikaji dalam penelitian ini perlu dimasukkan dengan tegas untuk memudahkan dalam pengumpulan data dan pengukurannya sehingga tidak mengundang interpretasi ganda. Berikut beberapa deskripsi konsep dalam penelitian ini :

1. Peranan yang dimaksud adalah pola tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh BPD Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.
2. BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa yang mewakili setiap Dusun di Desa Mattirowalie yang ditetapkan secara demokratis.

3. Fungsi pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan APBDes di Desa Mattirowalie.
4. Penyelenggaraan pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Mattirowalie dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **D. Tahap-Tahap Penelitian**

Ada 3 tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan laporan penelitian.

##### **1. Tahap perencanaan**

Langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam perencanaan adalah :

- a. Penentuan atau pemilihan masalah
- b. Latar Belakang
- c. Rumusan Masalah
- d. Tujuan dan manfaat penelitian
- e. Tinjauan pustaka dan Kerangka konsep
- f. Perumusan metode penelitian

Pada dasarnya hasil dari tahap perencanaan ini adalah rancangan penelitian yang sistematis penulisannya mencakup langkah diatas, penulisan rancangan penelitian harus:

- a. Mencakup kegiatan yang akan dilakukan
- b. Menuruti susunan yang sistematis dan logis
- c. Membatasi hal-hal yang tidak diperlukan

d. Memperkirakan hasil yang akan dicapai.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ada empat langkah yang harus dilakukan:

- a. Pengumpulan data
- b. Pengolahan data
- c. Analisis data
- d. Penafsiran hasil analisis

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan tugas lapangan dalam rangka mengumpulkan data untuk kemudian diproses. Proses ini meliputi penyuntingan dan analisis sebagai dasar penarikan kesimpulan.

## 3. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Penulisan harus memperhatikan beberapa hal seperti: tanda baca, bentuk dan isi, serta cara penyusunan skripsi.

## E. Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

Sumber data dalam penelitian ini di peroleh melalui dua cara, yakni sebagai berikut :



1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan cara melakukan wawancara langsung kepada informan yang telah dipilih yaitu Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, anggota BPD , Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Dusun ,Tokoh Masyarakat yang mewakili setiap Dusun dan pengamatan secara langsung dilapangan pada objek penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data diperoleh dari bahan bacaan, studi kepustakaan dan dokumentasi tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrument penelitian yang digunakan peneliti adalah lembar pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan selama proses wawancara berupa garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian, yang bertujuan menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan.

#### **G. Prosedur Pengumpulan Data**

Salah satu unsur yang paling penting dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data karena unsur ini mempengaruhi langkah- langkah berikutnya sampai dengan penarikan simpulan. Oleh karenaitu, untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka harus dipakai teknik yang benar untuk memperoleh data yang benar. Untuk mendapatkan data-data tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data dengan metode dibawah ini :

### 1. Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

### 2. Wawancara

Wawancara Mendalam, yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi terkait yang diteliti. Wawancara ini dilakukan kepada informan yang telah dipilih dan dianggap mengetahui/mengerti betul tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peranan BPD dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Kegiatan yang dimaksudkan untuk menganalisa atau mengetahui data yang berkaitan dengan Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

## **H. Pengecekan Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2012), sebagai berikut:

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangannya berbeda-beda.

### 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu

atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

## **I. Analisis Data**

Analisis mempunyai kedudukan yang sangat penting. Dilihat dari tujuan penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan apa adanya mengenai Peranan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah Desa**

Desa mattirowalie adalah salah satu desa dari 7 (tujuh) Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Desa mattirowalie terdiri atas 6 (enam) Dusun yakni Dusun Parenring, Cinekko, Bua, Limpo, Tille Dan Lappadare. Desa Mattirowalie adalah desa agraris. Selanjutnya gambaran tentang sejarah Desa Mattirowalie adalah sebagai berikut :

Desa mattirowalie adalah sebuah desa hasil pemakaran yang dulunya bergabung dengan Kelurahan Lompo Riaja. Namun karena desakan masyarakat dan persetujuan dari anggota DPRD Kab. Barru akhirnya dimekarkan pada tahun 1994, Dimekarkan dengan nama desa mattirowalie dan kepala desanya bernama M. ARIS, walaupun pada waktu itu masih dalam tahap desa persiapan. Pada tahun 1995 desa mattirowalie Menjadi desa definitif dan kepala desa masih M. ARIS sampai pada tahun 1999, Setelah melakukan pemilihan langsung kepala desa tahun 1999, akhirnya terpilih kembali sebagai kepala desa definitif periode 1999-2008 yaitu M. ARIS. Kemudian Pemilihan Kepala desa dilakukan kembali pada tahun 2008, dan yang terpilih

sebagai kepala desa yaitu BAKRI sampai periode 2014 Dengan habisnya masa jabatan kepala desa di tahun 2014 selanjutnya untuk sementara kepala desa di jabat oleh Dra. Hj. I.CALLI sampai sekarang.<sup>23</sup>

b. Demografi

1) Keadaan Geografis Desa

➤ Batas Wilayah

- Sebelah Timur : Desa Bacu-Bacu
- Sebelah Utara : Kelurahan Lompo Riaja
- Sebelah Barat : Desa Kading
- Sebelah Selatan : Desa Pattappa

➤ Luas Wilayah

Luas wilayah desa mattirowalie sekitar 2,718 Ha. Sebagian besar lokasi di desa mattirowalie adalah tanah persawahan, dan selebihnya adalah lahan perkebunan dan perumahan. Ada juga sebagian kecil penduduk yang berternak.

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan bapak Muhammad Risal pada tanggal 19 Mei 2016 Pukul 11.00 Wita

**Tabel 4.1** Daftar Luas wilayah setiap Dusun Desa Mattirowalie :

No	Dusun	Luas
1	Parenring	618 Ha
2	Cinekkko	430 Ha
3	Bua	300 Ha
4	Limpo	450 Ha
5	Tille	470 Ha
6	Lappadare	450 Ha
	Jumlah	2,718 Ha

Sumber : data pada kantor Desa Mattirowalie

➤ Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi desa mattirowalie adalah daerah dataran rendah dan daerah perbukitan. Wilayah dusun parenring, cinekkko, bua, limpo berada di daerah dataran rendah sedangkan dusun tille dan lappadare adalah daerah perbukitan.

2) Iklim

Iklim desa mattirowalie sebagaimana desa-desa lain di wilayah indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan hujan.

c. Keadaan Sosial

➤ Jumlah Penduduk

Desa mattirowalie mempunyai 1.057 KK dengan total jumlah penduduk 3.959 jiwa, yang tersebar dalam 6 dusun .

**Tabel 4.2.** Perincian jumlah penduduk laki-laki dan perempuan setiap Dusun.

No	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Parenring	472	506	978
2	Bua	207	216	423
3	Cinekko	328	333	661
4	Limpo	349	331	680
5	Tille	296	309	605
6	Lappadare	298	314	612
	Jumlah			3.959

Sumber: data pada kantor Desa Mattirowalie

➤ Tingkat Kesejahteraan

**Tabel 4.3** Perbandingan jumlah KK sejahtera dan pra sejahtera di Desa Mattirowalie sebagai berikut :

No	Dusun	Pra Sejahtera	Sejahtera	Total
1	Parenring	163 KK	215 KK	378 KK
2	Bua	41 KK	25 KK	66 KK
3	Cinekko	124 KK	47 KK	171 KK
4	Limpo	123 KK	53 KK	176 KK
5	Tille	93 KK	38 KK	131 KK
6	Lappadare	90 KK	45 KK	135 KK
	Jumlah			1.057 KK

Sumber: data pada kantor Desa Mattirowalie

d. Keadaan Ekonomi

1. Mata Pencarian

Karena desa mattirowalie merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani,



disamping itu juga ada mata pencaharian yang lain, perbandingan prosentase jenis mata pencaharian penduduk desa mattirowalie.

**Tabel 4.4** Daftar mengenai keadaan mata pencaharian penduduk  
Desa Mattirowalie

No	Mata Pencaharian	Prosentase
1	Pegawai negeri	0.5 %
2	Buruh/tukang	11 %
3	Wiraswasta	0,1 %
4	Pedagang	0,5 %
5	Petani	78 %

Sumber: data pada kantor Desa Mattirowalie

e. Kondisi Umum Pemerintahan Desa

1) Pembagian Wilayah Desa

❖ Wilayah administrasi Pemerintahan Desa

Desa mattirowalie terdiri atas 6 (enam) dusun yakni dusun parenring, dusun cinekko, dusun limpo, dusun tille dan dusun lappaddare dengan jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak 14 (empat belas) buah.

**Tabel 4.5** Daftar nama dusun dan jumlah RT-nya :

NO	NAMA DUSUN	RT
1	Parenring	5
2	Cinekko	2
3	Bua	1
4	Limpo	2
5	Tille	2
6	Lappadare	2
	Jumlah	14

Sumber: data pada kantor Desa Mattirowalie

## ❖ Sarana dan Prasarana Desa

## ➤ Sarana Umum

**Tabel 4.6** Daftar sarana umum yang ada di Desa

Mattirowalie.

No	Sarana	Jumlah
1	Pasar	- Buah
2	Pelabuhan	- Buah
3	Terminal	- Buah
4	Lapangan	- Buah

Sumber: data pada kantor Desa Mattirowalie

## ➤ Sarana Pendidikan

**Tabel 4.7** Daftar sarana pendidikan yang ada di Desa

Mattirowalie.

No	Sarana	Jumlah
1	TK	1 buah
2	SD	5 buah

Sumber: data pada kantor Desa Mattirowalie

## ➤ Sarana Keagamaan

**Tabel 4.8** Daftar sarana keagamaan yang ada di Desa

Mattirowalie.

No	Sarana	Jumlah
1	Mesjid	7 buah

Sumber: data pada kantor Desa Mattirowalie

➤ Sarana Transportasi

**Tabel 4.9** Daftar sarana transportasi yang ada di Desa Mattirowalie.

No	Jalan	Panjang
1	Propinsi	1,5 KM
2	Kabupaten	1,5 KM
3	Desa	13 KM

Sumber: data pada kantor Desa Mattirowalie

➤ Kualitas Jalan

**Tabel 4.10** Daftar kualitas jalan yang ada di Desa Mattirowalie.

No	Jalan	Panjang
1	Aspal	6 KM
2	Sirtu	2 KM
3	Tanah	10 KM
4	Setapak	3 KM

Sumber: data pada kantor Desa Mattirowalie

2) Visi dan Misi Desa Mattirowalie

❖ Visi

adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi desa mattirowalie dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan visi Desa

Mattirowalie adalah: **“Terwujudnya masyarakat desa yang maju dan makmur didukung oleh pertanian yang unggul dan sarana prasarana transportasi yang memadai ”**

❖ Misi

Selain penyusunan Visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Mattirowalie. Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Mattirowalie adalah :

1. Meningkatkan hasil pertanian
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM disegala bidang)
3. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat

**2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tugas pokok dan fungsi Pengawasan BPD yang telah dilaksanakan di Desa Mattirowalie yaitu sebagai berikut :

**a. Tugas pokok BPD**

**1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Munir bahwa, BPD merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. wadah aspirasi yang dimaksud disini yaitu sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan desa, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak Munir pada tanggal 20 Mei 2016 Pukul 10.20 Wita

**Tabel 4.11** Beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPD desa Mattirowalie, sebagai berikut :

No	Kegiatan	Volume	Tujuan	terealisasi	Belum terealisasi
1	Pembuatan jalan tani	700 meter	Untuk memperlancar arus transportasi dan ekonomi dilalui warga		✓
2	Pembangunan jalan rabat beton	500 meter	Untuk memperlancar arus transportasi	✓	
3	Penampungan air bersih	2 unit	Untuk menanggulangi kekurangan air bersih	✓	
4	Pengadaan Saluran irigasi pertanian	700 meter	Menambah lokasi pertanian saat kemarau	✓	
5	Rehab poskamling	2 unit	Agar ronda dapat digiatkan lagi	✓	
6	Pengadaan drainase	500 meter	Menambah lokasi pertanian	✓	
7	Pembuatan jambang	50 unit	Warga tidak buang air besar disembarang tempat		✓

Sumber : Data Pada Kantor Desa Mattirowalie

Keterangan :

Berdasarkan tabel diatas bahwa pembuatan jalan tani yang berjarak 700 meter belum terealisasi karna masyarakat tidak mau menyumbangkan sebagian tanahnya untuk dijadikan jalan

tani. Sedangkan pembuatan jambang sebanyak 50 unit juga belum terlaksana karna masih dalam tahap perencanaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suyuti menambahkan bahwa, Setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkah selanjutnya adalah BPD menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh BPD. Setelah memperoleh aspirasi dan kemudian membahasnya, BPD kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat. Namun pada kesempatan ini pihak pemerintah desa tetap diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.<sup>25</sup>

## 2) Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Munir bahwa, Sebelum diadakan Pemilihan Kepala Desa, BPD terlebih dahulu membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa. Yang dimana keanggotaannya berasal dari Unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh masyarakat.<sup>26</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suyuti menambahkan bahwa, Dalam pemilihan kepala desa di desa ini, hal yang dilakukan oleh BPD terlebih dahulu yaitu membentuk panitia pemilihan, dimana panitia-panitia tersebut dapat berasal dari tokoh-tokoh masyarakat, unsur-unsur perangkat desa, maupun

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Suyuti pada tanggal 23 Mei 2016 Pukul 04.00 Wita

<sup>26</sup>Wawancara dengan Bapak Munir pada tanggal 20 Mei 2016 Pukul 10.20 Wita

lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa, setelah itu anggota BPD berembuk dan berunding kemudian memutuskan siapa-siapa yang menjadi panitia pemilihan.

Adapun tugas dari panita pemilihan kepala desa yaitu :

- a. melaksanakan semua kegiatan selama pencalonan kepala desa dan bertanggung jawab kepada BPD dengan cara melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan mulai dari penjaringan bakal calon sampai dengan terpilih Kepala Desa.
  - b. Panitia pemilihan kepala desa, membuat semacam informasi atau sosialisasi di masyarakat bahwa akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, kemudian panitia pemilihan melakukan pendataan dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
  - c. Setelah itu, Bakal Calon Kepala Desa yang terpilih kemudian akan disaring melalui beberapa syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya dan hasil penyaringan akan di tetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
  - d. Calon Kepala Desa inilah yang nantinya akan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.<sup>27</sup>
- 3) Proses pembahasan dan penetapan peraturan Desa bersama Kepala Desa

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan bapak Suyuti pada tanggal 23 Mei 2016 Pukul 04.00 Wita



**Table 4.12** Data mengenai peraturan desa (Perdes) yang ada di  
Desa Mattirowalie, Tahun 2016

No	Perdes	Keterangan
1	No. 04 Tahun 2016 tentang RKPDes	Telah ditetapkan
2	No. 02 Tahun 2016 tentang RPJMDes	Telah ditetapkan
3	No. 03 Tahun 2016 tentang APBDes	Telah ditetapkan

Sumber : Data Pada Kantor Desa Mattirowalie

Berdasarkan tabel diatas bahwa rancangan peraturan desa dibuat oleh pemerintah desa kemudian kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk proses pembahasan dan penetapan , yang dihadiri oleh kepala dusun serta tokoh-tokoh masyarakat untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Munir yang mengatakan bahwa, Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa, BPD bersama-sama dengan pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. Pemerintah Desa terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD .

- c. BPD dan Kepala Dusun serta Tokoh-tokoh masyarakat memberikan masukan atau usulan untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.<sup>28</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suyuti menambahkan bahwa, Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting yaitu BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa kemudian Kepala Desa yang Menetapkan Peraturan Desa tersebut.<sup>29</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Munir yang mengatakan bahwa, Setelah usulan-usulan tersebut dibahas dan dievaluasi kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa.

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan bapak Munir pada tanggal 20 Mei 2016 Pukul 10.20 Wita

<sup>29</sup>Wawancara dengan bapak Suyuti pada tanggal 23 Mei 2016 Pukul 04.00 Wita

Berdasarkan wawancara Bapak Muhammad Rizal yang menambahkan bahwa, Usulan-usulan yang telah ditampung tersebut berasal atau bersumber dari Pemerintah Desa dan BPD serta Kepala Dusun dan tokoh-tokoh masyarakat yang ikut serta dalam proses pembahasan dan penetapan Peraturan Desa yang dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Meskipun gagasan atau usulan-usulan yang sudah ditampung lebih banyak berasal dari pemerintah desa.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok BPD tidak sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat bahwa hanya ada 3 (tiga) tugas pokok yang dilaksanakan dari 6 (enam) tugas pokok yang telah ditetapkan pada PP No 72 Tahun 2005.

#### **b. Fungsi pengawasan BPD**

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, adalah sebagai berikut :

- 1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.

**Table 4.13** Adapun Asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

No	Uraian belanja	Jumlah
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	150.000.000
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	600.000.000
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	136.000.000
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	100.000.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>986.000.000</b>

Sumber : Data pada kantor Desa Mattirowalie

Keterangan :

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Munir yang mengatakan bahwa, Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh kami selaku BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini kami lakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Mattirowalie terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain :

- a. Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa.
- b. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan.
- c. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
- d. Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan bapak Munir pada tanggal 20 Mei 2016 Pukul 10.20 Wita

## 2) Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Tabel 4.14** Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2016 sebesar Rp 986.000.000 ( Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah ) yang bersumber dari :

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>34.000.000</b>
1.1	Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong	10.000.000
1.2	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg sah	24.000.000
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>952.000.000</b>
2.1	Dana Desa	650.000.000
2.2	Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten	2.000.000
2.3	Alokasi Dana Desa	300.000.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>986.000.000</b>

Sumber : data pada kantor Desa Mattirowalie

## Keterangan :

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten, dan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Munir yang mengatakan bahwa, Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap

akhir tahun anggaran. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu :

- a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amir yang mengatakan bahwa, selama ini kegiatan desa mengenai pemasukan dan pengeluaran kas desa berjalan secara transparant .<sup>31</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Munir yang mengatakan bahwa, kami selalu memantau dan mengawasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.<sup>32</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suyuti yang menambahkan bahwa, BPD juga melakukan tindakan-tindakan apabila terdapat peraturan desa yang tidak berjalan di masyarakat. Bentuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BPD yaitu dengan memberikan teguran dan nasehat langsung oleh BPD dan akan dibahas bersama pemerintah desa.<sup>33</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Risal yang mengatakan bahwa, Dana Desa selalu dipantau oleh pihak BPD

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan bapak Amir pada tanggal 21 Mei 2016 Pukul 05.30 Wita

<sup>32</sup>Wawancara dengan bapak Munir pada tanggal 20 Mei 2016 Pukul 10.20 Wita

<sup>33</sup>Wawancara dengan bapak Suyuti pada tanggal 23 Mei 2016 Pukul 04.00 Wita

bahkan aparat (polisi dan jaksa) juga ikut andil dalam mengawasi dana desa.<sup>34</sup>

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa fungsi pengawasan yang telah dilakukan oleh BPD telah berjalan dengan baik karena dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku (UU No. 6 Tahun 2014) sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan APBDes.

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pengawasan BPD di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa mattirowalie, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dipengaruhi beberapa faktor yaitu:

#### **a. Faktor Pendorong**

##### **1) Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Munir yang mengatakan bahwa Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu Perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan bapak Muhammad Risal pada tanggal 19 Mei 2016 Pukul 11.00 Wita

menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan BPD.<sup>35</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abd Rahman yang menambahkan bahwa, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat membantu kami dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan BPD yang bisa menjadi faktor pendorong dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>36</sup>

## 2) Hubungan Kerja Sama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Amir yang mengatakan bahwa Salah satu faktor yang berpengaruh di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan BPD di Desa mattirowalie adalah pola hubungan kerja sama terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan, mendukung jalannya kinerja BPD. Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan bapak Munir pada tanggal 20 Mei 2016 Pukul 10.20 Wita

<sup>36</sup>Wawancara dengan bapak Abd Rahman pada tanggal 22 Mei 2016 Pukul 02.10 Wita



bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya.<sup>37</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Rizal yang menambahkan bahwa, pola hubungan kerja sama antara BPD dengan pemerintah desa sudah berjalan dengan baik, dimana pihak BPD selalu ada keterlibatan atau kordinasi dalam proses pembangunan, baik yang telah dan sedang direncanakan.<sup>38</sup>

#### **b. Faktor Penghambat**

##### **1) Kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Munir yang mengatakan bahwa, Adanya pemberian tunjangan atau pendapatan juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam memacu kinerja BPD untuk menjadi lebih baik dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap BPD.<sup>39</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mustamin bahwa, tunjangan yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim sehingga kami harus mencari pekerjaan sampingan .<sup>40</sup>

Hal inilah yang terkadang membuat anggota menomorduakan tugasnya. Pemberian tunjangan bagi anggota BPD dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan bapak Amir pada tanggal 21 Mei 2016 Pukul 05.30 Wita

<sup>38</sup>Wawancara dengan bapak Muhammad Risal pada tanggal 19 Mei 2016 Pukul 11.00 Wita

<sup>39</sup>Wawancara dengan bapak Munir pada tanggal 20 Mei 2016 Pukul 10.20 Wita

<sup>40</sup>Wawancara dengan bapak Mustamin pada tanggal 22 Mei 2016 Pukul 01.15 Wita

Gaji ataupun tunjangan yang diberikan hanya berasal dari dana operasional desa yang diberikan oleh pemerintah desa dan pemberiannya tidak menentu setiap bulan.

## 2) Sarana dan prasarana

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Munir yang mengatakan bahwa, Untuk menunjang kinerja anggota BPD, yang dibutuhkan yaitu sarana dan prasarana seperti tempat atau kantor sebagai pusat kegiatan. Tidak adanya tempat khusus bagi BPD sebagai pusat kegiatan administratif layaknya lembaga legislatif lainnya, fasilitas operasional juga menjadi faktor berpengaruh demi kelancaran kinerja BPD. Meskipun BPD hanya bekerja dalam skala desa, hal ini juga menjadi faktor berpengaruh.<sup>41</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Risal yang mengatakan bahwa, Sarana dan prasarana yang ada di desa mattirowalie masih kurang memadai seperti tempat atau kantor BPD yang belum ada, seharusnya BPD mempunyai ruang kantor tersendiri dan tidak bergabung kepada kantor kepala desa sebagai mitra kerjanya. Oleh karenanya dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan BPD akan terhambat.<sup>42</sup>

## 3) Kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suyuti yang mengatakan bahwa, Salah satu faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD di desa mattirowalie adalah kurangnya SDM yang masih rendah dimana sebagian

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan bapak Munir pada tanggal 20 Mei 2016 Pukul 10.20 Wita

<sup>42</sup>Wawancara dengan bapak Muhammad Risal pada tanggal 19 Mei 2016 Pukul 11.00 Wita

anggota BPD yang tidak mengetahui secara jelas tugas dan fungsinya sehingga masih dibutuhkan arahan dan bimbingan dari pihak-pihak yang dirasa mampu khususnya dinas pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga desa selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kelembagaan. Sehingga nantinya anggota BPD memiliki pengetahuan yang lebih dan wawasan yang bagus tentang pemerintahan sehingga orang-orang tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa nantinya.<sup>43</sup>

- 4) Adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Munir yang mengatakan bahwa, masyarakat tidak hanya menjadi faktor pendukung tapi juga dapat menjadi faktor penghambat mana kala dalam penetapan suatu keputusan ada masyarakat yang kontra, hal ini tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.<sup>44</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Rizal yang mengatakan bahwa : BPD harus mampu memahami kondisi-

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan bapak Suyuti pada tanggal 23 Mei 2016 Pukul 04.00 Wita

<sup>44</sup>Wawancara dengan bapak Munir pada tanggal 20 Mei 2016 Pukul 10.20 Wita

kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ataupun SDM masyarakat berbeda, oleh karena itu dibutuhkan inovasi dari BPD agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat.<sup>45</sup>

## **B. Pembahasan**

1. Tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru belum sepenuhnya dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat karena tidak semua tugas pokok yang telah ditentukan oleh undang-undang dilaksanakan oleh BPD Mattirowalie.

BPD di Desa Mattirowalie telah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala Desa, proses pembahasan dan penetapan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Hal ini terbukti dengan kemampuan BPD Mattirowalie yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk pelaksanaan pembangunan Desa seperti pembuatan jalan, jembatan, jalan tani, dan pembuatan perairan pertanian, serta

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan bapak Muhammad Risalpada tanggal 19 Mei 2016 Pukul 11.00 Wita

merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk pembuatan peraturan Desa. Tidak semua dari aspirasi tersebut dijadikan peraturan Desa, hal ini disebabkan oleh pertimbangan efektivitas, bahwa jika setiap aspirasi dirumuskan dalam peraturan desa maka akan kurang efektif karena membutuhkan waktu yang panjang membuat suatu perdes sedangkan kebutuhan masyarakat akan tersalurnya aspirasi dalam Perdes semakin besar. Dalam hal ini, BPD bersama Pemerintah Desa mengambil tindakan langsung untuk melaksanakannya.

Adapun dalam pelaksanaan tugas pokok BPD yaitu pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa juga telah dilaksanakan oleh BPD di Desa Mattirowalie. Di dalam pembentukan panitia pemilihan, BPD membentuk panitia pemilihan umum yang berasal unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. BPD dan ketua panitia pemilu berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten untuk menetapkan Kepala Desa terpilih agar selanjutnya Bupati dapat mengeluarkan surat keputusan penetapan Kepala Desa. Demikian halnya dengan usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. BPD berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk segera mengeluarkan surat pemberitahuan tentang masa jabatan Kepala Desa yang akan segera berakhir, sehingga dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa untuk periode selanjutnya.

Pelaksanaan tugas pokok pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa periode 2014-2016 oleh BPD Mattirowalie belum terlaksana sehingga sampai sekarang belum dilakukan pemilihan Kepala Desa dan

untuk sementara jabatan Kepala Desa Mattirowalie dijabat oleh Ibu Dra.Hj.I.Calli Selaku Sekcam Kecamatan Tanete Riaja.Hal ini disebabkan karena belum adanya keputusan dari Bupati untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

Selanjutnya, mengenai proses pembahasan dan penetapan peraturan Desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa yang disetujui oleh BPD melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Apabila telah diperoleh kesepakatan maka rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagi Peraturan Desa.Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting yaitu BPD menyetujui

dikeluarkannya Peraturan Desa kemudian Kepala Desa yang Menetapkan Peraturan Desa tersebut.

Mengenai Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Mattirowalie adalah Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu :

- a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.

Pengawasan yang dilakukan telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap APBDes. Pengawasan juga dilakukan oleh pihak lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Namun, pengawasan terhadap anggaran tetap perlu untuk ditingkatkan melalui kerjasama antara BPD dengan Kepolisian dan Kejaksaan serta masyarakat.

Apabila terjadi penyelewengan, BPD akan memberikan teguran secara kekeluargaan untuk pertama kalinya, dan selanjutnya akan diklarifikasi dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua BPD. Namun, jika terdapat suatu persoalan yang sulit dipecahkan, maka BPD akan melaporkannya kepada Camat dan Bupati untuk segera ditindaklanjuti.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

- a. Faktor pendorong

Adapun faktor pendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru yaitu Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan Hubungan Kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa.

Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan serta dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa yang dibuat bersama berperan besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan BPD. Besarnya dukungan dari masyarakat kepada BPD juga dapat memberikan ruang gerak untuk dapat melaksanakan tugas dan pengawasannya.

Selain itu hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan pemerintah Desa yang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD, hubungan yang harmonis sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar dimana posisi dan fungsi keduanya saling mendukung untuk terselenggaranya pemerintahan desa.



b. Faktor penghambat

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD tidak selalu berjalan lancar. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD yaitu, Kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD Sarana dan prasarana, Kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta Adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

Pelaksanaan tugas pokok BPD Desa Mattirowalie sepenuhnya belum terlaksana hal ini dapat dilihat tugas pokok yang telah dilaksanakan oleh BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala Desa, proses pembahasan dan penetapan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa.

Mengenai fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh BPD telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap APBDes.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong yaitu Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Sedangkan faktor penghambat yaitu Kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, Sarana dan prasarana, Kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta Adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.

## **B. Implikasi**

Sebagai suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan pemerintahan maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang pemerintahan khususnya dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dan penelitian-penelitian selanjutnya, seperti :

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses Pelaksanaan tugas pokok BPD Desa Mattirowalie yang telah dilaksanakan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala Desa, proses pembahasan dan penetapan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Sedangkan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dan APBDes.

Apabila pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD berjalan dengan efektif atau optimal, maka akan berdampak baik terhadap pemerintah Desa dan masyarakat sehingga pembangunan yang ada di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru akan berjalan dengan baik.

## **C. Saran**

Setelah kita memperhatikan hasil penelitian di atas, menurut penulis ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan atau saran bagi semua pihak tentang peranan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Adapun saran- saran tersebut, sebagai berikut:

### **1. Kepada BPD**

BPD diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh kebutuhan dari masyarakat dalam hal pembangunan agar tidak ada lagi

perbedaan pendapat dalam proses menentukan pembangunan di desa mattirowalie, dan melaksanakan tugas pokok yang belum dilaksanakan serta perlunya kesadaran bagi anggota BPD agar lebih sering hadir di kantor desa untuk melaksanakan kewajibannya dan lebih mempermudah dalam berkoordinasi dengan Kepala Desa.

2. Kepada Pemerintah Desa

Karena masih banyak program pembangunan yang belum dilaksanakan, maka kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD yang berlangsung dengan baik perlu dipertahankan untuk pelaksanaan pembangunan yang belum berjalan. Dengan mempertahankan kerjasama, diharapkan program pembangunan yang belum terlaksana dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

3. Kepada masyarakat

Masyarakat diharapkan agar dapat memberikan dukungan/partisipasi kepada BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasannya .serta masyarakat harus sadar dengan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah desa karena pembangunan tersebut semata-mata untuk masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Huda Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. cetakan pertama (malang: setara press 2015)

Nurcholis Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (erlangga 2011) hal 74

Rusdiyanta Syahril syarbaini, *dasar-dasar sosiologi*. edisi pertama (yogyakarta: graha ilmu 2009)

Solekhan, Moch. MAP. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan pertama (malang: setara press 2014)

Sarman. *pemerintahan daerah di indonesia*. (jakarta: rineka cipta 2011)

Santoso Purwo, *pembaharuan Desa secara partisipatif*. cetakan pertama (yogyakarta: pustaka pelajar 2003) hal 96

Tim akar media, *kamus lengkap praktis bahasa indonesia*. (surabaya: akar media 2003)

Widaja. HAW. *Otonomi desa*. Cetakan ketujuh. (jakarta: rajawali pers 2014)

Yustika Ahmad Erani. *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa*. cetakan pertama. (jakarta selatan: kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi RI 2015)

### B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang peraturan Daerah

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Undang-undang Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 6 Tahun 2014

Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

### C. Internet

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan.html>. 23:20

<http://www.ras-eko.com/2016/01/25/pengertian-peranan.html>. 00:27

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

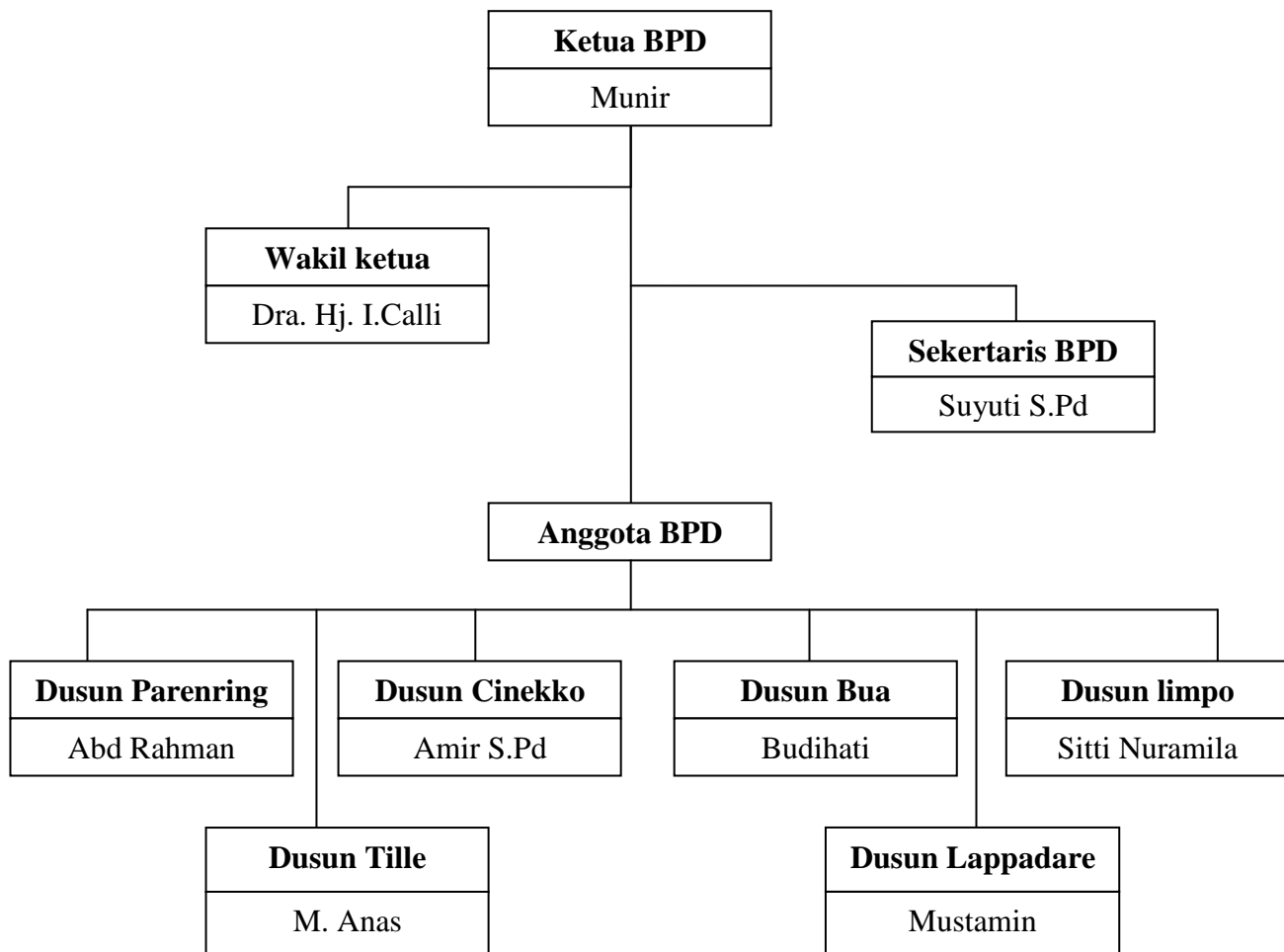
**A**

**N**

**Struktur Organisasi Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja  
Kabupaten Barru**



**Struktur Pengurus BPD Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja**  
**Kabupaten Barru**





**DAFTAR INFORMAN**

1. Nama : Munir  
Pendidikan Formal Terakhir : SMA  
Jabatan : Ketua BPD
2. Nama : Suyuti  
Pendidikan Formal Terakhir : SMA  
Jabatan : Sekretaris BPD
3. Nama : Amir  
Pendidikan Formal Terakhir : S1  
Jabatan : Anggota BPD
4. Nama : Sitti Nur'amilah  
Pendidikan Formal Terakhir : Sarjana Muda  
Jabatan : Anggota BPD
5. Nama : Budihati  
Pendidikan Formal Terakhir : SMA  
Jabatan : Anggota BPD
6. Nama : Abd Rahman  
Pendidikan Formal Terakhir : SMA  
Jabatan : Anggota BPD

7. Nama : Mustamin  
 Pendidikan Formal Terakhir : SMP  
 Jabatan : Anggota BPD
8. Nama : Dra. Hj. I.Calli  
 Pendidikan Formal Terakhir : S1  
 Jabatan : Pj. Kades Mattirowalie
9. Nama : Muhammad Rizal  
 Pendidikan Formal Terakhir : S1  
 Jabatan : Sekretaris Desa Mattirowalie
10. Nama : Yusuf  
 Pendidikan Formal Terakhir : SD  
 Pekerjaan : Petani
11. Nama : Anwar  
 Pendidikan Formal Terakhir : SD  
 Pekerjaan : wiraswasta
12. Nama : Lukman  
 Pendidikan Formal Terakhir : SMA  
 Pekerjaan : Wirausaha
13. Nama : Iskandar  
 Pendidikan Formal Terakhir : PGSD-S1 UT  
 Pekerjaan : Guru
14. Nama : Maman  
 Pendidikan Formal Terakhir : SMP  
 Pekerjaan : Petani

### **Daftar Pertanyaan Wawancara !**

1. Menurut bapak/ibu, apakah selama ini segala bentuk program pembangunan Desa, baik yang telah dan sedang direncanakan melibatkan pihak BPD dalam hal perencanaan dan pelaksanaannya ?
  - a. Jika, (ya) apa alasannya:.....
  - b. Jika, (tidak) apa alasannya:.....
2. Terhadap pelaksanaan Perda, menurut bapak/ibu apakah selama ini Kepala Desa tidak pernah melakukan penyelewengan ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
3. Apabila Kepala Desa melakukan penyelewengan atau tindakan yang sulit dipecahkan, apakah BPD memberikan sanksi berupa pelaporan kepada Camat atau Bupati untuk ditindak lanjuti ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
4. Berkaitan pertanyaan nomor tiga di atas dalam perkara apa saja yang selama ini pihak BPD tangani berkaitan dengan pelanggaran Kepala Desa ?

- a. ....
  - b. ....
5. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPD selama ini terutama yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran Kas Desa, apakah menurutnya tergolong sudah sangat baik ?
- a. Jika, (ya) apa alasannya:.....
  - b. Jika, (tidak) apa alasannya:.....
6. Terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana-dana swadaya dari masyarakat, apakah menurut bapak/ibu selama ini juga sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan ?
- a. Jika, (ya) apa alasannya:.....
  - b. Jika, (tidak) apa alasannya:.....
7. Kendala-kendala apakah yang menurut bapak/ibu yang terkadang mempengaruhi fungsi pengawasan yang selama ini dijalankan ?
- a. ....
  - b. ....
8. Menurut bapak/ibu, apakah faktor pendorong pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan ?
- a. ....
  - b. ....
9. Menurut bapak/ibu, apakah upaya yang telah dilakukan oleh BPD dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasannya ?
- a. ....
  - b. ....

10. Menurut bapak/ibu, bagaimana proses pembentukan panitia pemilihan kepala Desa ?
11. Menurut bapak/ibu, bagaimana proses pembahasandan penetapan peraturan Desa ?
12. Menurut bapak /ibu,  
apakah aspirasi masyarakat sudah tertampung dan sudah terealisasi ?
12. Menurut bapak/ibu, apakah proses penetapan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
13. Menurut bapak/ibu, apakah proses penetapan ABD desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dalam perencanaan pembangunan Desa ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
14. Menurut bapak/ibu, apakah Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
15. Menurut bapak/ibu, bagaimana tugas dan fungsi pengawasan BPD selama ini apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya ?

16. Menurut bapak/ibu, apakah yang harus dilakukan oleh pihak BPD dalam meningkatkan kinerjanya agar pembangunan desa dapat berjalan secara optimal ?

- a. ....
- b. ....
- c. ....

**Daftar pertanyaan wawancara untuk Kepala Dusun :**

- 1. Menurut bapak/ibu apakah BPD sudah melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana mestinya
- 2. Menurut bapak/ibu apakah sudah terlaksana dengan baik fungsi pengawasan BPD
- 3. Menurut bapak/ibu apa hal yang dilakukan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya
- 4. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa

**Daftar pertanyaan wawancara untuk masyarakat :**

- 1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang BPD di desa mattirowalie?
- 2. Apakah bapak/ibu mengetahui tugas dan fungsi BPD ?
- 3. Menurut bapak/ibu, apakah BPD pernah melakukan sosialisasi terhadap tugas dan fungsinya di desa mattirowalie?
- 4. Menurut bapak/ibu, bagaimanakah kinerja BPD apakah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik?
- 5. Menurut bapak/ibu, apakah keberadaan BPD memberikan pengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa?

6. Apakah aspirasi bapak/ibu, telah ditampung dan disalurkan oleh BPD?

## **DOKUMENTASI**



Wawancara dengan bapak Munir pada tanggal 20 Mei 2016 Pukul 10.20 Wita



Wawancara dengan bapak Suyuti pada tanggal 23 Mei 2016 Pukul 04.00 Wita





Wawancara dengan ibuBudihatipada tanggal 21 Mei 2016 Pukul 09.00 Wita



Wawancara dengan bapak Abd Rahman pada tanggal 22 Mei 2016 Pukul 02.10 Wita



Wawancara dengan ibuSittiNur'amilahpada tanggal 18 Mei 2016 Pukul 11.20 Wita





Wawancara dengan bapak Mustamin pada tanggal 22 Mei 2016 Pukul 01.15 Wita



Wawancara dengan bapak Amir pada tanggal 21 Mei 2016 Pukul 05.30 Wita





Wawancara dengan ibu Hj. I, callipada tanggal 20 Mei 2016 Pukul 09.30 Wita



Wawancara dengan bapak Muhammad Risal pada tanggal 19 Mei 2016 Pukul 11.00 Wita



Wawancara dengan bapak Ibrahim pada tanggal 20 Mei 2016 Pukul 11.00 Wita





Wawancara dengan bapak Muh. Salehpada tanggal 22 Mei 2016 Pukul 02.00 Wita



Wawancara dengan bapak Iskandar pada tanggal 24 Mei 2016 Pukul 04.00 Wita



Wawancara dengan bapak Yusuf pada tanggal 20 Mei 2016 Pukul 10.00 Wita





Wawancara dengan bapak Anwar pada tanggal 22 Mei 2016 Pukul 03.40 Wita





Wawancara dengan bapak Bidinpada tanggal 21 Mei 2016 Pukul 04.45 Wita



Wawancara dengan bapak Lukmanpada tanggal 23 Mei 2016 Pukul 02.30 Wita